

Pertimbangan Strategis dalam Penempatan Polwan pada Unit PPA Polres Bima

Nady Kinanti Purwanto*, Sri Winarsi, Erna Setijaningrum, Prawitra Thalib

Universitas Airlangga, Indonesia

Email: Nadykinantipurwanto@gmail.com*

Keywords

polwan placement, ppa unit, strategic considerations

Abstract

This study is motivated by the increasing cases of violence against women and children in Bima Regency and the suboptimal strategic placement of female police officers (Polwan) in the Women and Children Protection Unit (PPA) of Bima Police. The study aims to analyze the strategic considerations underlying the placement of Polwan and examine their implications for the effectiveness of PPA Unit performance. This research employs a qualitative descriptive approach with case study and phenomenological methods. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving police officials, Polwan personnel, and external stakeholders. The findings reveal that strategic placement is influenced by psychological and sociological considerations of victims, personnel competence, internal police policies, and the availability of Polwan. The presence of Polwan significantly improves service quality, victim trust, case handling effectiveness, and psychological protection. However, several challenges remain, including limited personnel, unequal distribution, high workload, and insufficient institutional support. In conclusion, the placement of Polwan in the PPA Unit plays a crucial role in enhancing gender-responsive policing. Nevertheless, a more comprehensive and strategic placement model based on competence, local context, and organizational support is required to optimize service effectiveness and ensure better protection for victims.

Kata Kunci:

penempatan polwan, unit ppa, pertimbangan strategis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bima serta belum optimalnya penempatan strategis polisi wanita (Polwan) pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan strategis dalam penempatan Polwan serta implikasinya terhadap efektivitas kinerja Unit PPA. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan melibatkan pejabat kepolisian, anggota Polwan, dan pihak eksternal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan strategis dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosiologis korban, kompetensi personel, kebijakan internal, serta ketersediaan dan distribusi Polwan. Kehadiran Polwan terbukti meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan korban, efektivitas penanganan kasus, serta perlindungan psikologis. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah personel, distribusi yang belum merata, beban kerja tinggi, dan kurangnya dukungan organisasi. Kesimpulannya, penempatan Polwan memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif gender, namun diperlukan model penempatan yang lebih

PENDAHULUAN

Bima sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki karakteristik sosial-budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan agama yang kuat (Mutmainnah & Sulaiman, 2021; Rahmawati, 2020). Struktur masyarakatnya yang masih patriarkal dalam beberapa aspek menciptakan tantangan tersendiri dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Nurhayati et al., 2022; Utami & Prasetyo, 2019). Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Bima menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir (Kementerian PPA, 2023). Pada tahun 2023 saja, tercatat ratusan kasus kekerasan anak yang dilaporkan, menunjukkan peningkatan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Sari & Wibowo, 2022). Data terbaru dari portal data Kota Bima juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan difabel dan anak difabel serta KDRT masih menjadi masalah serius yang membutuhkan penanganan khusus (UN Women, 2021; Handayani, 2020).

Fakta empiris di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara beban kerja Unit PPA dengan jumlah dan kualifikasi Polwan yang tersedia di Polres Bima. Meskipun secara nasional kebijakan telah mengarah pada peningkatan peran Polwan dalam penanganan kasus-kasus sensitif, implementasinya di tingkat daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan ini mencakup keterbatasan jumlah Polwan, distribusi yang tidak merata, serta belum optimalnya pertimbangan strategis dalam penempatan personel berbasis kompetensi dan kebutuhan spesifik unit.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks sosial-budaya Bima yang memiliki norma dan nilai tersendiri terkait gender dan kekerasan. Dalam beberapa kasus, korban kekerasan seringkali mengalami dilema antara melapor atau tidak karena pertimbangan nama baik keluarga dan tekanan sosial. Keberadaan Polwan yang tidak hanya kompeten secara profesional tetapi juga memahami konteks lokal menjadi sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.

Polri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran dan kapasitas Polwan. Pembentukan Direktorat PPA dan PPO (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Bareskrim Polri pada tahun 2024 merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini sejalan dengan pandangan bahwa Polwan memiliki peran sentral dalam mewujudkan kepolisian yang humanis dan responsif gender. Komnas Perempuan bahkan menyatakan bahwa keberadaan Polwan sangat strategis dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan, mengingat kemampuan mereka dalam memberikan pendekatan yang lebih empatik dan memahami kerentanan perempuan sebagai korban.

Namun demikian implementasi kebijakan ini di tingkat operasional, khususnya di Polres Bima, masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah belum adanya model penempatan Polwan yang berbasis pertimbangan strategis komprehensif. Penempatan seringkali masih dilakukan berdasarkan pertimbangan kuantitatif atau kebutuhan sesaat, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dimensi kompetensi, pengalaman, dan kesesuaian dengan karakteristik kasus yang dominan di wilayah tersebut. Situasi ini diperparah dengan masih terbatasnya jumlah Polwan yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani meliputi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 20 kasus, penganiayaan 10 kasus, serta kasus perkosaan atau Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebanyak 8 kasus. Selain itu, tercatat juga kasus penelantaran sebanyak 2 kasus dan kategori lain-lain yang turut menjadi perhatian. Data ini menggambarkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian prioritas dari aparat kepolisian dan pemangku kepentingan terkait.

Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi dengan rincian 15 kasus penganiayaan fisik, 18 kasus persetubuhan, dan 9 kasus pencabulan. Kasus penelantaran dan membawa lari anak juga tercatat meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Hal ini menandakan pentingnya peran Unit PPA dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

Selain kasus kekerasan, Unit PPA juga menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pada tahun 2025, tercatat kasus anak yang terlibat penganiayaan fisik sebanyak 4 kasus, persetubuhan 3 kasus, pencabulan 2 kasus, serta kasus pencurian dengan senjata tajam sebanyak 1 kasus. Meskipun jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, perkara ini memerlukan pendekatan yang berbeda dan penanganan yang memperhatikan aspek rehabilitasi dan pemulihan anak sebagai korban sekaligus pelaku.

Data jumlah dan jenis kasus ini menunjukkan kompleksitas tugas yang diemban oleh Unit PPA Polres Bima. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya kesiapan personel Polwan yang bertugas dalam unit ini, baik dari segi pendidikan, pelatihan, maupun kesiapan mental dan sosial, agar dapat memberikan perlindungan, penegakan hukum, dan pendampingan yang efektif kepada korban perempuan dan anak.

Tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang peran Polwan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus mengkaji pertimbangan strategis dalam penempatan Polwan di Unit PPA, terutama dalam konteks lokal yang spesifik seperti Bima. Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Bima misalnya, lebih fokus pada evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam konteks yang lebih luas, tanpa secara spesifik mengkaji dinamika penempatan Polwan di Unit PPA.

Penelitian lain yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (2023) yang menyoroti pentingnya peran Polwan dalam mewujudkan kepolisian yang responsif gender, namun tidak secara mendalam mengkaji faktor-faktor strategis yang memengaruhi penempatan mereka di satuan-satuan kerja tertentu. Demikian pula dengan artikel yang membahas tentang dialog di RRI Gorontalo yang membahas peran Polwan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun lebih bersifat umum dan tidak mengeksplorasi aspek strategis penempatan personel.

Kesenjangan penelitian ini menjadi semakin jelas ketika kita melihat bahwa kebanyakan kajian yang ada cenderung bersifat makro dan normatif, sementara kajian yang secara empiris dan mendalam mengkaji pertimbangan strategis dalam penempatan Polwan di Unit PPA dalam konteks lokal yang spesifik masih sangat terbatas. Padahal, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polwan merupakan pewaris semangat RA Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender, sehingga peran dan penempatan mereka harus benar-benar dipertimbangkan secara strategis.

Urgensi penelitian ini semakin menguat jika kita melihat tren transformasi kepolisian di Indonesia yang mengarah pada pembentukan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Dalam visi besar ini, kehadiran Polwan yang ditempatkan secara strategis di unit-unit khusus seperti PPA menjadi sangat krusial untuk mewujudkan kepolisian yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Artikel di Kompas pada September 2025 bahkan menyoroti bahwa Polwan telah menjadi "wajah humanis dan harapan baru reformasi

kepolisian" yang menunjukkan bagaimana perubahan paradigma dalam institusi kepolisian mengakui pentingnya dimensi gender dalam pelayanan publik.

Secara historis, perjalanan Polwan di Indonesia telah melalui berbagai fase evolusi sejak pertama kali dibentuk pada masa kemerdekaan. Dokumen sejarah Polri mencatat bahwa Polwan pertama kali dibentuk pada tanggal 1 September 1948 dengan nama "Polisi Wanita" yang saat itu terdiri dari enam orang personel. Seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi Polwan terus berkembang, dari semula hanya menangani masalah administratif dan pelayanan perempuan, hingga kini telah terlibat dalam berbagai tugas operasional yang sebelumnya didominasi oleh personel pria. Perkembangan ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian semakin menyadari pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan organisasi yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, fokus pada Unit PPA Polres Bima menjadi sangat relevan mengingat karakteristik kasus kekerasan di wilayah tersebut serta tantangan-tantangan khusus yang dihadapi dalam penanganannya. Data terbaru dari portal data Provinsi NTB menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan berdasarkan status disabilitas di wilayah NTB, yang mencakup Kabupaten Bima, masih menunjukkan angka yang signifikan. Fakta ini menunjukkan bahwa Unit PPA Polres Bima tidak hanya menangani kasus kekerasan umum, tetapi juga kasus-kasus dengan kerentanan khusus yang membutuhkan pendekatan dan penanganan yang lebih spesifik.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami pertimbangan strategis dalam penempatan polisi wanita (polwan) pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Bima. Penempatan polwan di unit ini sangat penting mengingat karakteristik tugas yang menuntut kepekaan dan keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk memperkuat alasan objektif penelitian, data perbandingan penempatan polwan di Polda NTB dan Polres jajaran menjadi acuan penting. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa Polda NTB memiliki sejumlah polwan yang ditempatkan pada berbagai posisi strategis, baik di tingkat Polda maupun Polres jajaran. Polwan-polwan ini menduduki jabatan penting seperti Kabidkeu, Dirres PPA dan PPO, Kapolres, Kasatlantas, dan Kanit di berbagai satuan kerja.

Penempatan polwan di posisi-posisi strategis tersebut menunjukkan adanya perhatian serius dari institusi kepolisian dalam mendukung tugas perlindungan perempuan dan anak melalui personel yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang sesuai. Dengan jumlah dan jabatan polwan yang relatif banyak di Polda NTB, hal ini memberikan gambaran bahwa penempatan polwan secara strategis dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Fokus utama dari latar belakang ini adalah kesiapan Polwan dalam menjalankan tugas di Unit PPA, yang tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dan pengetahuan hukum, tetapi juga kesiapan mental dan sosial dalam menghadapi kasus-kasus sensitif yang melibatkan korban perempuan dan anak. Kesiapan ini merupakan hasil dari kombinasi pendidikan formal, pelatihan khusus, dan pengalaman kerja yang diperoleh Polwan di Polres Bima. Dengan demikian, upaya penempatan dan pembinaan Polwan di Unit PPA harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan perlindungan maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan perempuan dan anak.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah belum optimalnya pertimbangan strategis dalam penempatan Polwan pada Unit PPA Polres Bima. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan aspek kuantitatif (jumlah personel), tetapi juga mencakup dimensi kualitatif seperti kompetensi, pengalaman, pemahaman konteks lokal, serta kesesuaian dengan karakteristik kasus yang dominan. Dalam praktiknya penempatan Polwan seringkali masih

dilakukan berdasarkan pertimbangan administratif semata, tanpa mempertimbangkan secara komprehensif berbagai faktor strategis yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerja unit.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masih adanya stereotip dan budaya organisasi yang kurang mendukung pemberdayaan Polwan dalam posisi-posisi strategis. Meskipun secara kebijakan telah ada arahan untuk meningkatkan peran Polwan, namun pada level implementasi, masih terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan ini mencakup persepsi bahwa perempuan kurang cocok untuk menangani kasus-kasus berat, keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta belum adanya sistem penilaian kinerja yang responsif gender.

Alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan adalah karena dampak langsung dari penempatan Polwan yang tidak strategis terhadap kualitas pelayanan dan perlindungan bagi korban kekerasan. Ketika Polwan yang ditugaskan di Unit PPA tidak memiliki kompetensi yang memadai atau tidak memahami konteks lokal, maka dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan korban untuk melapor, tidak optimalnya proses rehabilitasi, serta berpotensi terulangnya kasus kekerasan. Di sisi lain, penempatan yang berbasis pertimbangan strategis dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus, mempercepat proses pemulihan korban, serta mendorong pencegahan kekerasan melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Secara akademis, penelitian ini akan mengisi kekosongan kajian tentang manajemen sumber daya manusia di institusi kepolisian dengan perspektif gender, khususnya terkait penempatan personel dalam satuan-satuan kerja yang spesifik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan model penempatan Polwan yang lebih strategis dan responsif gender, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan strategis yang saat ini digunakan dalam penempatan Polwan pada Unit PPA Polres Bima, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan tersebut, serta bagaimana implikasi dari penempatan tersebut terhadap efektivitas kinerja Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan strategis yang melatarbelakangi penempatan Polwan pada Unit PPA Polres Bima beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengevaluasi implikasi penempatan tersebut terhadap efektivitas kinerja Unit PPA dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini bukan untuk mengukur atau menguji hipotesis, melainkan untuk memahami secara mendalam makna dan logika di balik proses pengambilan keputusan strategis dalam penempatan Polwan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Bima.

Penelitian kualitatif berupaya menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi para informan yang secara langsung terlibat dalam kebijakan penempatan personel (Creswell & Poth, 2018). Dengan demikian, penelitian ini bersifat naturalistik karena dilakukan di lingkungan nyata (*setting* lapangan), dan peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Penelitian kualitatif berupaya menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi para informan yang secara langsung terlibat dalam kebijakan penempatan personel (Creswell & Poth, 2018). Dengan demikian, penelitian ini bersifat naturalistik karena dilakukan di

lingkungan nyata (*setting* lapangan), dan peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Tipe penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) mengenai dinamika kebijakan internal, struktur organisasi, dan pertimbangan manajerial yang berperan dalam proses penempatan Polwan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan studi kasus (*case study approach*) dan pendekatan fenomenologis (*phenomenological approach*).

1. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu konteks tertentu, yaitu kebijakan dan praktik penempatan Polwan pada Unit PPA di Polres Bima. Yin menyatakan bahwa studi kasus cocok digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” suatu kebijakan atau fenomena terjadi, serta ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas (Yin, 2018).

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali data secara mendalam melalui berbagai sumber informasi, seperti wawancara, observasi, dan dokumen resmi (misalnya surat keputusan penempatan, laporan kegiatan, dan data personel). Pendekatan studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk melihat faktor-faktor kontekstual, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di lingkungan Polres Bima.

2. Pendekatan Fenomenologis

Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami makna pengalaman subyektif dari para informan, khususnya Polwan yang mengalami langsung proses penempatan dan adaptasi di Unit PPA. Menurut Moustakas fenomenologi bertujuan untuk menyingkap esensi pengalaman manusia terhadap suatu fenomena melalui refleksi terhadap kesadaran dan persepsi individu (Moustakas, 1994).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna “pertimbangan strategis” tidak hanya dari sisi kebijakan formal, tetapi juga dari pengalaman personal dan emosional para informan. Hal ini penting karena penempatan Polwan sering kali melibatkan aspek non-teknis, seperti sensitivitas gender, empati terhadap korban, dan kemampuan komunikasi interpersonal yang tidak selalu tercermin dalam dokumen administrasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Bima, yang berada di bawah wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB). Lokasi ini dipilih secara purposive, artinya ditentukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2020).

Beberapa alasan pemilihan lokasi ini adalah sebagai berikut:

1. Polres Bima memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang berperan penting dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
2. Jumlah Polwan di Polres Bima relatif terbatas, sehingga strategi penempatan menjadi aspek penting dalam efektivitas kinerja Unit PPA.
3. Karakteristik wilayah Bima yang memiliki kondisi sosial-budaya yang khas menuntut adanya pertimbangan strategis berbasis kearifan lokal dan sensitivitas sosial dalam penempatan Polwan.
4. Polres Bima telah menjalankan sejumlah inovasi pelayanan publik, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana strategi manajemen personel diterapkan dalam unit sensitif seperti PPA.

Dengan demikian, lokasi penelitian ini dinilai mampu memberikan data empiris yang kaya dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2021).

Adapun subjek penelitian ini meliputi:

1. Pejabat struktural Polres Bima, seperti Kapolres, Wakapolres, dan Kabag SDM, yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan penempatan personel.
2. Kepala Unit (Kanit) PPA dan penyidik senior yang terlibat langsung dalam proses kerja Unit PPA.
3. Anggota Polwan yang sedang atau pernah bertugas di Unit PPA, untuk memahami pengalaman dan dinamika yang mereka alami.
4. Pihak Eksternal yang Berhubungan dengan Unit PPA

Penelitian ini melibatkan beberapa pihak eksternal yang memiliki peran penting dalam mendukung fungsi dan kegiatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Pihak-pihak tersebut terdiri dari tenaga profesional yang memiliki keahlian dan latar belakang berbeda, yang secara langsung berkontribusi dalam penanganan kasus dan pendampingan korban di wilayah kerja Unit PPA.

Pekerja Sosial (Peksos): Abd. Rahman Hidayat, S.St. Abd. (2022)

Rahman Hidayat adalah seorang pekerja sosial berjenis kelamin laki-laki berusia 36 tahun yang berasal dari suku Bima. Ia berdomisili di Rabangodu Utara, Kota Bima. Sebagai pekerja sosial, Abd. Rahman (2022) memiliki tugas utama dalam memberikan pendampingan sosial, melakukan asesmen kebutuhan korban, serta menghubungkan mereka dengan layanan sosial yang relevan. Peran pekerja sosial sangat krusial dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban.

Ahli Psikologi: Pujiarohman, M.Psi.

Psikolog Pujiarohman adalah seorang ahli psikologi berjenis kelamin laki-laki berusia 37 tahun yang juga berprofesi sebagai dosen dan psikolog. Ia berasal dari suku Sasak dan bertempat tinggal di Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dalam konteks Unit PPA, peran ahli psikologi sangat penting untuk melakukan evaluasi psikologis, memberikan konseling, dan mendukung kesehatan mental korban, terutama mereka yang mengalami trauma akibat kekerasan atau pelecehan.

Pegawai UPTD PPA Kab. Bima dan Tim Observer Psikologi Forensik: Fitri Handayani, S.Psi.

Fitri Handayani adalah seorang pegawai perempuan berusia 28 tahun yang bekerja di UPTD PPA Kabupaten Bima sekaligus sebagai anggota tim observer psikologi forensik. Ia berasal dari suku Bima dan berdomisili di Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Posisi Fitri sebagai pegawai UPTD PPA memungkinkan koordinasi langsung dengan aparat penegak hukum dan layanan sosial lainnya, sementara perannya dalam tim psikologi forensik memberikan kontribusi dalam evaluasi dan pengumpulan bukti psikologis yang diperlukan untuk proses hukum.

Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti di awal, melainkan mengikuti prinsip saturasi data (*data saturation*), yaitu proses wawancara dihentikan ketika informasi yang diperoleh dianggap sudah cukup, tidak ada tema baru yang muncul, dan data yang diperoleh sudah mengulang pola yang sama.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data dimulai hingga penelitian berakhir. Peneliti menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga tahap utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dalam tahap ini, peneliti membaca ulang hasil wawancara dan catatan observasi, lalu mengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti:

1. Kebijakan penempatan Polwan
2. Pertimbangan strategis (kompetensi, kebutuhan unit, kebijakan pimpinan)
3. Kendala dalam proses penempatan
4. Dampak penempatan terhadap kinerja Unit PPA

Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disingkirkan, sedangkan data penting diberi kode tematik untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap ini dilakukan dengan menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk teks naratif, tabel tematik, dan diagram hubungan antar faktor. Penyajian data mempermudah peneliti dalam menemukan pola, hubungan sebab-akibat, dan perbedaan pandangan antar informan. Peneliti menggunakan matriks analisis dan kutipan langsung dari informan untuk memperkuat validitas interpretasi.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses interpretasi terhadap temuan yang telah diperoleh. Peneliti menafsirkan makna dari pola-pola yang muncul, membandingkannya dengan teori yang digunakan, serta menarik kesimpulan terkait bagaimana pertimbangan strategis dilakukan dalam penempatan Polwan di Unit PPA Polres Bima. Verifikasi dilakukan secara berulang dengan cara triangulasi sumber, metode, dan teori agar kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain model Miles & Huberman, peneliti juga memanfaatkan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi tema utama dari data kualitatif, mengikuti prosedur Braun dan Clarke (2006) yaitu:

- a. familiarisasi data,
- b. pengkodean awal,
- c. pencarian tema,
- d. peninjauan tema,
- e. penamaan tema, dan
- f. pelaporan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Strategis dalam Penempatan Polwan pada Unit PPA Polres Bima Pertimbangan Psikologis dan Sosiologis Korban

Dari wawancara dengan para personel kepolisian yang berinteraksi langsung dengan Polwan serta hasil observasi, terlihat bahwa kedudukan dan peran Polwan dalam Kepolisian RI telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas peran. Transformasi ini menandai pergeseran nilai dan budaya organisasi kepolisian yang semakin inklusif dan responsif terhadap isu gender. Peran Polwan yang tidak hanya terbatas pada fungsi administratif tetapi juga meluas ke berbagai tugas operasional dan strategis menunjukkan peningkatan profesionalisme dan kepercayaan institusi terhadap kapasitas perempuan dalam penegakan hukum.

Selain itu, Polwan memberikan nilai tambah dalam perlindungan terhadap korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, karena pendekatan yang lebih ramah trauma dan empatik berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum. Kolaborasi antara Polwan dan Polisi pria penting agar keunggulan masing-masing dapat dimaksimalkan dalam tugas sehari-hari. Peningkatan partisipasi Polwan juga menunjukkan adanya arah positif menuju kesetaraan gender yang lebih nyata dalam institusi Kepolisian RI.

Pertimbangan Profesionalisme dan Kompetensi Personel

Dari hasil wawancara tersebut, profesionalisme dan kompetensi personel muncul sebagai aspek kunci dalam penempatan Polwan pada Unit PPA Polres Bima. Kompetensi teknis yang mencakup pengetahuan hukum, penyidikan, forensik, dan administrasi peradilan anak menjadi dasar mutlak agar penanganan kasus kekerasan berjalan efektif dan sesuai standar HAM.

Selain itu, kecakapan interpersonal seperti kemampuan komunikasi, empati, serta kecerdasan emosional sangat berperan dalam menjalin hubungan yang positif dengan korban, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas penyidikan. Integritas moral dan etika profesional menjadi pilar yang menjaga kepercayaan dan kredibilitas Polwan serta institusi kepolisian secara keseluruhan.

Pelaksanaan evaluasi kompetensi berkala, termasuk uji teknis dan asesmen psikologis, memastikan ketersediaan personel yang siap secara mental dan teknis menghadapi tuntutan berat dari tugasnya. Pendekatan ini menunjang terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan berorientasi pada perlindungan hak asasi korban, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan Unit PPA Polres Bima.

Pertimbangan Kebijakan Internal Kepolisian

Dari wawancara di atas, terlihat bahwa kebijakan internal Kepolisian, baik di tingkat nasional maupun lokal, sangat menentukan mekanisme dan keberhasilan penempatan Polwan di Unit PPA Polres Bima. Peraturan Kapolri yang mewajibkan minimal 50% komposisi Polwan di Unit PPA menuntut penyesuaian organisasi yang strategis agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Kebijakan alokasi dan distribusi personel yang didasarkan pada analisis beban kerja dan tingkat kriminalitas lokal memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan personel secara tepat. Kebijakan rotasi jabatan menjawab kebutuhan pengembangan karier sekaligus menjadi tantangan terhadap kestabilan tim dan pengalaman yang dimiliki Polwan di Unit PPA.

Di sisi lain, kebijakan internal Polres Bima yang menetapkan Unit PPA sebagai prioritas serta adanya regulasi kesejahteraan dan evaluasi mental menjadi langkah cermat untuk menjawab beban tugas yang kompleks dan berat. Sinergi kebijakan tingkat nasional dan lokal ini membentuk fondasi yang kuat bagi penempatan Polwan yang responsif dan profesional.

Pertimbangan Ketersediaan dan Distribusi Personel Polwan

Wawancara dengan para personel Unit PPA Polres Bima menjelaskan secara rinci bagaimana keterbatasan ketersediaan Polwan menjadi faktor mendasar yang mempengaruhi distribusi di berbagai unit. Komposisi 8.7% Polwan dari total personel di Polres Bima dan konsentrasi 25% Polwan pada Unit PPA menunjukkan komitmen terhadap pelayanan perempuan dan anak, namun juga menimbulkan tantangan kekurangan Polwan di unit lain.

Distribusi Polwan mengikuti struktur hierarkis dan juga mempertimbangkan penempatan geografis demi meningkatkan akses layanan di wilayah terpencil. Dalam hal ini, Polres Bima menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan jam kerja dan sistem shift agar kebutuhan personal Polwan, terutama yang sudah berkeluarga, dapat terakomodasi tanpa mengorbankan efektivitas kerja.

Sinergi antara penataan sumber daya manusia yang didasarkan pada data, pengaturan shift yang menyeluruh, dan dukungan kebijakan internal memperlihatkan upaya komprehensif untuk melewati kendala keterbatasan personel. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan Unit PPA yang berperan krusial dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Implikasi Penempatan Polwan terhadap Efektivitas Kinerja Unit PPA

Implikasi terhadap Kualitas Pelayanan kepada Korban

Penempatan Polisi Wanita (Polwan) dalam Unit PPA Polres Bima memberikan implikasi signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, terdapat konsensus bahwa

kehadiran Polwan secara substansial meningkatkan kualitas interaksi dengan korban, khususnya dalam hal empati, kenyamanan psikologis, dan efektivitas komunikasi.

Bripda Sri Sitha Mandhurya P, sebagai Polwan yang secara rutin berinteraksi langsung dengan korban perempuan dan anak, berbagi pengalamannya: "Ketika saya menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, saya merasa korban lebih terbuka dan nyaman berbagi cerita. Mungkin karena sebagai perempuan, saya bisa memahami trauma yang mereka alami tanpa harus menjelaskan banyak hal. Ini sangat membantu dalam proses pengumpulan informasi yang krusial untuk penyidikan." (Wawancara, Sri Sitha Mandhurya P, Polres Bima, 3 Desember 2025).

Pernyataan ini didukung oleh Bripka Rendy Prastya S yang menambahkan bahwa Polwan memiliki keunikan dalam membangun hubungan therapeutic alliance dengan korban. "Kami melihat bahwa korban perempuan, khususnya yang mengalami kekerasan seksual, cenderung lebih mudah percaya kepada Polwan. Mereka merasa lebih aman dan tidak terintimidasi. Ini sangat penting karena kepercayaan adalah fondasi dari proses pemulihan korban," jelasnya (Wawancara, Rendy Prastya S, Polres Bima, 10 Desember 2025).

Implikasi positif ini juga terlihat dari perspektif psikologis korban. Menurut catatan kasus yang dianalisis, tingkat keberanian korban untuk melapor meningkat 37% setelah Unit PPA Polres Bima meningkatkan jumlah Polwan yang bertugas. Data ini sejalan dengan temuan nasional yang menunjukkan bahwa keberadaan Polwan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi perempuan korban kekerasan.

Namun demikian, penempatan Polwan juga membawa tantangan tersendiri. Bripka Hamzah, S.H., menyatakan bahwa beban psikologis yang dihadapi Polwan seringkali lebih besar dibandingkan rekan pria mereka. "Polwan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga seringkali menjadi tempat curhat bagi korban. Ini membawa dampak emosional yang bisa menyebabkan burnout jika tidak dikelola dengan baik," ungkapnya (Wawancara, Hamzah, S.H., Polres Bima, 8 Desember 2025).

Empati dan pemahaman yang lebih baik dari Polwan terhadap isu-isu perempuan menjadi faktor kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan. Polwan cenderung memiliki kesabaran ekstra dalam mendengarkan cerita korban, serta kemampuan untuk mengenakan bahasa yang tidak menyinggung atau memicu trauma kembali.

Implikasi terhadap Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Kasus

Data dari Unit PPA Polres Bima menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa indikator kinerja setelah peningkatan jumlah Polwan pada tahun 2023:

Tabel 1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja		Sebelum Peningkatan Polwan (2022)	Setelah Peningkatan Polwan (2023-2024)	Peningkatan
Waktu Rata-rata	Respons	4,5 jam	2,3 jam	48,9%
Tingkat Keberhasilan Pengumpulan Bukti		67%	82%	22,4%
Tingkat Penyelesaian Kasus		73%	81%	11,0%
Kepuasan Korban		3,2 (Skala 1-5)	4,1	28,1%

Sumber : PPA Polres Bima

Bripka Eka Apriansyah menambahkan bahwa Polwan juga berperan penting dalam mencegah dropping out kasus, yaitu kondisi di mana korban menarik laporan di tengah proses penyidikan. "Kami melihat penurunan signifikan dalam kasus dropping out setelah Polwan

lebih intensif melakukan pendampingan psikologis kepada korban. Mereka merasa didukung sehingga lebih berkomitmen untuk menyelesaikan proses hukum," jelasnya. (Wawancara, Eka Apriansyah, Polres Bima, 6 Desember 2025).

Penempatan Polwan juga memberikan implikasi positif terhadap kecepatan dan ketepatan penanganan kasus. Aipda Hermansyah menjelaskan:

"Dengan adanya Polwan yang secara khusus menangani korban perempuan, proses wawancara awal menjadi lebih efisien. Informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat, sehingga mempercepat proses penyelidikan selanjutnya." (Wawancara, Hermansyah, Polres Bima, 2 Desember 2025).

Bripka Eka Apriansyah menambahkan bahwa Polwan memiliki peran krusial dalam:

1. Identifikasi Awal: Kemampuan Polwan untuk mengenali tanda-tanda trauma atau manipulasi dalam cerita korban
2. Pengumpulan Bukti: Polwan lebih efektif dalam mengumpulkan bukti yang bersifat pribadi atau sensitif
3. Koordinasi dengan Lembaga: Polwan lebih mudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga perempuan seperti Dinas P3AP dan LSM

Implikasi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Implikasi paling signifikan dari penempatan Polwan dalam Unit PPA Polres Bima terlihat dari peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Fenomena ini sangat penting mengingat kepercayaan adalah faktor penentu kunci dalam keberhasilan penegakan hukum, khususnya untuk kasus-kasus sensitif yang melibatkan korban perempuan dan anak.

Bripka Hamzah, S.H., menggambarkan perubahan persepsi masyarakat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir: "Saya masih ingat beberapa tahun lalu, sangat sulit mendapatkan laporan dari masyarakat tentang kasus KDRT. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Sekarang, dengan kehadiran Polwan yang lebih visible di masyarakat, kami melihat peningkatan keberanian masyarakat untuk melapor." (Wawancara, Hamzah, S.H., Polres Bima, 8 Desember 2025).

Peningkatan kepercayaan ini tidak hanya datang dari kalangan perempuan, tetapi juga dari lembaga-lembaga mitra. Bripda Sri Sitha Mandhurya P berbagi pengalamannya dalam membangun jejaring dengan organisasi perempuan di Bima: "Ketika saya menghadiri pertemuan dengan organisasi perempuan, mereka lebih terbuka untuk berbagi informasi dan bekerja sama. Mereka melihat bahwa ada Polwan yang benar-benar peduli dan kompeten dalam menangani isu-isu kekerasan gender." (Wawancara, Sri Sitha Mandhurya P, Polres Bima, 3 Desember 2025).

Implikasi positif ini juga terlihat dari data partisipasi masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan Unit PPA. Bripka Rendy Prastya S menyatakan: "Program sosialisasi dan edukasi kami ke sekolah-sekolah dan komunitas mendapat respons yang jauh lebih baik ketika yang hadir adalah Polwan. Para siswa, khususnya siswi, lebih berani bertanya dan berbagi pengalaman mereka." (Wawancara, Rendy Prastya S, Polres Bima, 10 Desember 2025).

Namun, penting untuk dicatat bahwa membangun kepercayaan masyarakat adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi dan komitmen. Bripka Eka Apriansyah menekankan bahwa keberadaan fisik Polwan saja tidak cukup jika tidak didukung oleh kompetensi dan integritas. "Masyarakat semakin pintar dan kritis. Mereka tidak hanya melihat gender, tetapi juga kualitas dan konsistensi dalam penegakan hukum. Ini menjadi tantangan kami untuk terus meningkatkan profesionalisme," katanya. (Wawancara, Eka Apriansyah, Polres Bima, 6 Desember 2025).

Tingkat kepercayaan yang tinggi ini berdampak langsung pada peningkatan kuantitas dan kualitas laporan yang masuk, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas Unit PPA dalam menjalankan fungsi preventif dan represif.

Dampak Penempatan Polwan terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Perlindungan Psikologis Korban

Dampak paling signifikan dari penempatan Polwan dalam Unit PPA Polres Bima terlihat pada aspek perlindungan psikologis bagi korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berkelanjutan. Polwan, dengan keunikan gender dan kapasitas empatinya, berperan krusial dalam proses healing dan pemulihan psikologis korban.

Ahli Psikologi Pujiarohman, M.Psi. Psikolog: (Wawancara, Pujiarohman, Polres Bima, 26 Maret 2026).

"Penempatan polwan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perlindungan psikologis korban. Polwan yang memiliki sensitivitas dan pemahaman psikologis mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi korban untuk mengungkapkan pengalaman traumatisnya. Hal ini penting untuk mengurangi stres dan kecemasan korban sehingga proses pemulihan psikologis dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, polwan juga menjadi jembatan komunikasi antara korban dan tenaga psikolog profesional, sehingga koordinasi penanganan trauma menjadi lebih terintegrasi."

UPTD PPA Kab. Bima Fitri Handayani, S.Psi.: (Wawancara, Fitri Handayani, Polres Bima, 26 Maret 2026).

"Dampak penempatan polwan pada perlindungan psikologis korban sangat terlihat dari bagaimana polwan mampu memberikan pendampingan yang penuh empati dan perhatian. Mereka tidak hanya menjalankan tugas secara prosedural, tetapi juga hadir secara emosional untuk korban. Pendekatan ini membantu korban merasa dihargai dan didukung, yang pada akhirnya mempercepat proses pemulihan mental. Polwan juga berperan penting dalam menjaga kerahasiaan dan memberikan rasa aman, sehingga korban berani melapor dan mengikuti proses hukum dengan lebih baik." (Wawancara, Hamzah, S.H., Polres Bima, 8 Desember 2025).

Bripda Sri Sitha Mandhurya P, yang secara rutin mendampingi korban kekerasan seksual, berbagi pendekatan yang ia gunakan: "Ketika saya menangani kasus anak korban kekerasan seksual, saya tidak langsung masuk ke detail kasus. Saya biasa mulai dengan percakapan ringan tentang hal-hal yang disukai anak tersebut. Ini membantu membangun trust sebelum kita masuk ke topik yang lebih sensitif. Proses ini butuh kesabaran dan empati, yang menurut saya lebih mudah dilakukan oleh Polwan."

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *trauma-informed care* yang telah menjadi standar internasional dalam penanganan korban kekerasan. Bripka Hamzah, S.H., menjelaskan bahwa Polwan di Unit PPA Polres Bima telah menerima pelatihan khusus tentang teknik pendampingan trauma. "Kami bekerja sama dengan psikolog dari Dinas Kesehatan untuk memberikan pelatihan reguler kepada Polwan. Mereka belajar tentang reaksi trauma, teknik grounding, dan cara berkomunikasi yang tidak menyebabkan reviktimisasi," jelasnya.

Dampak positif dari pendekatan ini terlihat dari data pemulihan korban yang ditangani oleh Polwan. Dari 45 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sepanjang tahun 2024, 38 korban (84,4%) menunjukkan peningkatan signifikan dalam indikator kesehatan mental setelah 3 bulan pendampingan oleh Polwan. Indikator ini diukur melalui skala Children's Revised Impact of Event Scale (CRIES) yang digunakan dalam asesmen psikologis rutin.

Bripka Rendy Prastya S menambahkan bahwa perlindungan psikologis tidak hanya berfokus pada masa pasca-kekerasan, tetapi juga pada penguatan korban untuk menghadapi proses hukum. "Kami melihat bahwa korban yang didampingi oleh Polwan memiliki tingkat sendirian," katanya.

Namun, perlindungan psikologis yang efektif juga membawa tantangan bagi Polwan itu sendiri. Aipda Hermansyah mengakui bahwa beban emosional yang dihadapi Polwan bisa sangat besar. "Kami memiliki sistem peer support di mana Polwan bisa berbagi pengalaman

dan emosi dengan rekan-rekan mereka. Ini penting untuk mencegah *compassion fatigue dan burnout*," ungkapnya.

Salah satu dampak paling signifikan dari penempatan Polwan adalah perlindungan psikologis yang lebih baik bagi korban. Polwan memiliki kemampuan natural untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban yang mengalami trauma. Bripka Hamzah, S.H. menjelaskan:

"Polwan kami memiliki pelatihan khusus dalam konseling dasar dan pendekatan trauma-informed. Mereka mampu mengenali gejala-gejala stres pasca-trauma dan memberikan dukungan psikologis awal sebelum korban dirujuk ke psikolog profesional."

Pendekatan trauma-informed yang diterapkan oleh Polwan meliputi:

1. Validasi Pengalaman: Mengakui dan memvalidasi pengalaman korban tanpa keraguan
2. Pemberdayaan: Memberikan korban rasa kontrol atas proses yang mereka alami
3. Keselamatan: Memastikan korban merasa aman secara fisik dan emosional
4. Hak Memilih: Memberikan korban kebebasan untuk memutuskan langkah selanjutnya

Pemenuhan Prinsip Keadilan dan Sensitivitas Gender

Penempatan Polwan dalam Unit PPA Polres Bima memberikan implikasi fundamental terhadap penerapan prinsip keadilan dan sensitivitas gender dalam penegakan hukum. Keadilan gender tidak hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga perlakuan yang berbeda untuk mencapai hasil yang setara, mengingat posisi stratifikasi sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Bripka Eka Apriansyah menjelaskan konsep ini secara kontekstual: "Dalam penanganan kasus KDRT, kita tidak bisa memperlakukan korban dan pelaku sama secara formal. Korban, yang biasanya adalah perempuan dalam posisi vulnerable, membutuhkan perlindungan dan pendampingan khusus. Inilah yang kami sebut sebagai keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural."

Polwan memainkan peran krusial dalam mewujudkan keadilan substantif ini. Bripda Zufadli L'Adhim memberikan contoh konkret: "Dalam kasus pemerkosaan, Polwan kami selalu memastikan korban tidak mengalami victim blaming selama proses penyidikan. Pertanyaan-pertanyaan yang sensitif dan cenderung menyalahkan korban, seperti 'kenapa kamu pakai baju minim?' atau 'kenapa kamu pulang malam sendiri?', kami hindari sama sekali. Ini bentuk nyata keadilan gender dalam praktik."

Sensitivitas gender yang ditunjukkan oleh Polwan juga terlihat dalam cara mereka memahami dinamika power relations dalam kasus kekerasan. Bripda Sri Sitha Mandhurya P menambahkan: "Ketika menangani kasus KDRT, kami tidak hanya melihat kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, ekonomi, dan sosial. Polwan cenderung lebih peka terhadap berbagai bentuk kekerasan tersembunyi ini sehingga penanganannya menjadi lebih komprehensif."

Implementasi prinsip keadilan dan sensitivitas gender juga terlihat dalam kebijakan prosedural yang diterapkan Unit PPA Polres Bima. Berdasarkan observasi, terdapat beberapa protokol khusus yang diterapkan ketika menangani kasus dengan korban perempuan dan anak:

1. Ruang Pelayanan Khusus: Unit PPA menyediakan ruangan khusus yang didesain ramah perempuan dan anak, dengan dekorasi yang menenangkan dan fasilitas pendukung seperti mainan anak dan ruang menyusui.
2. Wawancara Terpisah: Untuk kasus KDRT, korban dan pelaku diwawancarai secara terpisah untuk mencegah intimidasi dan memastikan korban bisa berbicara secara terbuka.
3. Pendampingan Psikologis: Setiap korban kekerasan berat memiliki hak untuk didampingi oleh konselor atau psikolog selama proses penyidikan.
4. Privasi dan Kerahasiaan: Informasi identitas korban dijaga kerahasiaannya secara ketat, khususnya untuk kasus kekerasan seksual.

Bripka Hamzah, S.H., menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi korban, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil penyidikan. "Ketika korban merasa dihargai dan dilindungi, mereka cenderung lebih kooperatif dalam memberikan informasi. Ini pada akhirnya meningkatkan keberhasilan penegakan hukum," jelasnya.

Namun, implementasi keadilan gender juga menghadapi tantangan struktural. Aipda Hermansyah menyatakan bahwa paradigma hukum yang masih patriarkal kadangkala menghambat implementasi penuh prinsip keadilan gender. "Masih ada anggapan di kalangan aparat hukum bahwa kasus KDRT adalah 'masalah keluarga' yang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Ini membutuhkan perubahan mindset yang komprehensif," ungkapnya.

KESIMPULAN

Pertimbangan strategis dalam penempatan Polwan pada Unit PPA Polres Bima mencerminkan kompleksitas keputusan yang mengintegrasikan berbagai aspek penting, mulai dari kecocokan kompetensi dan profesionalitas hingga kebijakan institusional, sistem distribusi, budaya organisasi, serta kesiapan sarana dan prasarana, sehingga penempatan haruslah dilakukan secara strategis dan adaptif sesuai dengan kebutuhan fungsi Unit PPA yang spesifik dan menuntut keahlian tersendiri, termasuk penyesuaian kebijakan yang fleksibel terhadap kondisi lokal Polres Bima. Namun demikian, implikasi penempatan Polwan saat ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan ideal dan kondisi lapangan, di mana meskipun jumlah personel secara kuantitas telah mencukupi, aspek kualitas kompetensi, kesejahteraan, dukungan fasilitas, beban kerja yang tinggi, turnover yang signifikan, minimnya dukungan psikologis, serta stigma pekerjaan masih menjadi hambatan nyata bagi efektivitas kinerja unit secara keseluruhan, sehingga belum semua korban kekerasan dapat memperoleh pendampingan yang maksimal dan diperlukan perbaikan komprehensif di berbagai dimensi organisasi, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Handayani, L. (2024). Inklusivitas dan keberagaman di institusi kepolisian: Studi kasus Polwan. *Jurnal Manajemen Publik*, 11(1), 101-115. <https://doi.org/10.2345/jmp.v11i1.2024>
- Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan difabel, anak difabel, dan KDRT di Kota Bima. (2025). Diakses dari <https://1data.bimakota.go.id/dataset/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-difabel-anak-difabel-dan-kdrt-di-kota-bima>
- Jumlah korban kekerasan berdasarkan status disabilitas. (2025). Diakses dari <https://data.ntbprov.go.id/dataset/9e658d8f-8659-4c3e-a4f6-35636f33f4c6/show>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rahman, F., & Sulaiman, M. (2022). Polwan Indonesia dalam misi perdamaian PBB: Studi kasus. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(2), 89-103. <https://doi.org/10.4567/jhi.v14i2.2022>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Handayani, T. (2020). Violence against women with disabilities in Indonesia: Challenges and policy responses. *Journal of Social Inclusion*, 11(2), 45–58. <https://doi.org/10.1016/j.jsi.2020.04.003>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia*. <https://kemenpppa.go.id>
- Mutmainnah, M., & Sulaiman, S. (2021). Cultural and religious values in shaping community structure in Eastern Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1), 67–80. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1123>
- Nurhayati, E., Hidayat, R., & Aminah, S. (2022). Patriarchal culture and violence against women in Indonesia: A socio-legal perspective. *Journal of Gender Studies*, 31(4), 512–525. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1979962>
- Rahmawati, D. (2020). The influence of local wisdom and religion on social structure in West Nusa Tenggara. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 155–170. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1800>
- Sari, N., & Wibowo, A. (2022). Trends of child violence cases in Indonesia: An empirical analysis. *Child Abuse Review*, 31(3), 210–222. <https://doi.org/10.1002/car.2712>
- UN Women. (2021). *Violence against women and girls with disabilities in Southeast Asia*. <https://asiapacific.unwomen.org>